



BAB I
PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki populasi lebih dari 270 juta orang yang tersebar di 17.000 pulau. Menurut Survei Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2020, 10,38 persen dari populasi Indonesia, atau 28,05 juta orang, diklasifikasikan sebagai penyandang disabilitas. Menurut Komisi Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Asia dan Pasifik (UNESCAP), Indonesia memiliki prevalensi disabilitas terbesar di Asia Tenggara, yaitu satu dari sepuluh penduduk. Penerapan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menandakan sebuah kemajuan yang patut dicatat dalam hal legislasi pengakuan hak-hak penyandang disabilitas di berbagai bidang, seperti aksesibilitas di tempat umum, pekerjaan, dan pendidikan. Namun, sejumlah kendala masih menghalangi implementasi kebijakan ini, seperti ketiadaan infrastruktur yang aksesibel bagi penyandang disabilitas dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya inklusi. Tabel berikut menunjukkan persentase penyandang disabilitas di Indonesia menurut jenis gangguannya selama tahun 2023.

Tabel 1.1. Persentase Penyandang Disabilitas Menurut Jenis Gangguan

No.	Uraian	Persentase Disabilitas		N Tertimbang
		%	95% CI	
1.	Disabilitas Pendengaran	0,4	0,4 – 0,4	863,402
2.	Disabilitas Penglihatan	0,6	0,5 – 0,6	
3.	Disabilitas Berjalan	0,4	0,4 – 0,4	
4.	Disabilitas Fisik	0,4	0,3 – 0,4	188.185
5.	Disabilitas Intelektual	1,0	0,9 – 1,1	
6.	Disabilitas Mental	0,8	0,7 – 0,9	
7.	Disabilitas Sensorik	0,2	0,2 – 0,2	
8.	Disabilitas Komunikasi	0,5	0,4 – 0,5	

Sumber: Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kemenkes, 2023

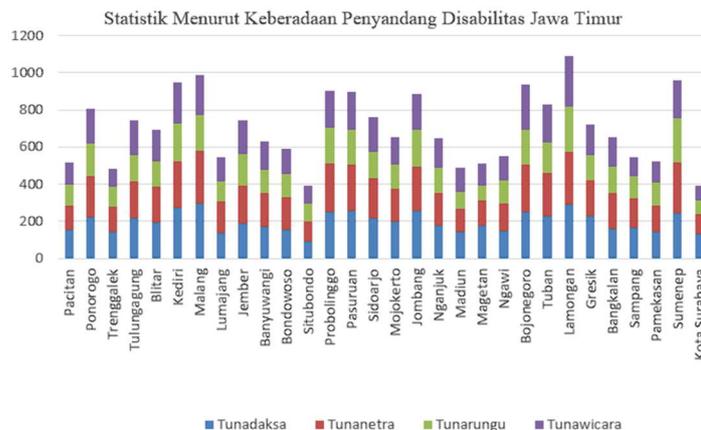
Dari data pada tabel 1.1, persentase (%) dalam tabel ini menunjukkan proporsi individu dengan jenis disabilitas tertentu dalam populasi, misalnya 0,4% berarti 4 dari 1.000 orang memiliki jenis disabilitas tersebut. Interval kepercayaan

95% (95% CI) menggambarkan rentang estimasi persentase dengan tingkat keyakinan 95%. Sebagai contoh, untuk disabilitas pendengaran dengan CI 0,4–0,4, hasil survei ini sangat konsisten. Kolom "N tertimbang" mencerminkan jumlah individu dalam sampel yang telah disesuaikan untuk merepresentasikan populasi sebenarnya, seperti 863.402 untuk disabilitas penglihatan.

Dari jumlah pengangguran dengan disabilitas berat, penyandang disabilitas yang berusia antara 15 hingga 24 tahun dan 25 hingga 34 tahun mencapai sekitar 55,5%. Penyandang disabilitas ringan juga mengikuti pola yang sama (Gunawan dan Rezki, 2022). Untuk meningkatkan akses penyandang disabilitas muda ke pasar tenaga kerja, diperlukan adanya inisiatif dan upaya yang tepat sasaran.

Menurut *International Labour Organization (ILO) (2015)* Sekitar 82% penyandang disabilitas di negara berkembang berada di bawah garis kemiskinan dan sering kali mengalami hambatan dalam mendapatkan layanan kesehatan, pendidikan, pelatihan, dan pekerjaan yang berkualitas. Sehingga, mereka menghadapi hambatan yang cukup besar untuk terlibat dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagian besar bangunan dan fasilitas umum di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, tidak memenuhi kriteria aksesibilitas yang diperlukan. Kajian terhadap literatur yang relevan oleh Liritantri et al. (2021) dan Yudha dan Setiyowati (2016) mengindikasikan bahwa fasilitas yang secara khusus ditujukan untuk penyandang disabilitas, seperti jalur landai, jalur pemandu, dan rambu-rambu informasi, sering kali tidak dapat diakses atau tidak berfungsi dengan baik.

Seperti yang ditunjukkan oleh Jawa Timur, berdasarkan kerangka hukum nasional yang ditetapkan oleh UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas diketahui bahwa pelaksanaannya di tingkat daerah masih sangat terbatas. Hal ini menunjukkan adanya kekurangan yang signifikan dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas baik di tingkat kota maupun kabupaten (Setijaningrum, 2024). Gambar 1.1. menunjukkan jumlah pada setiap jenis disabilitas berdasarkan wilayah kota/ kabupaten di Jawa Timur.



Gambar 1.1. Banyaknya Penyandang Disabilitas Kota/Kabupaten di Jawa Timur

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019

Dari data jumlah disabilitas pada Jawa Timur, berikut ini adalah tiga kota tertinggi yang kemudian diambil data untuk dianalisis sebagai berikut.

Tabel 1.2. Data Tiga Kabupaten/Kota dengan Jumlah Penyandang Disabilitas Tertinggi di Jawa Timur

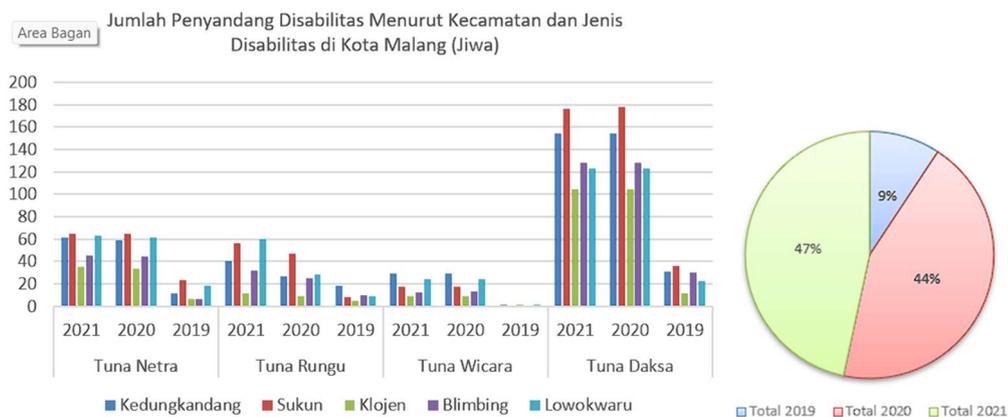
No.	Kabupaten/Kota	Keterangan
1.	Lumajang	Belum ada informasi atau statistik yang valid, akurat, dan ter verifikasi terkait jumlah pelatihan disabilitas
2.	Malang	Data informasi atau statistik dari penyandang disabilitas dan pelatihan disabilitas tersedia secara valid dan bersumber
3.	Kediri	Belum ada informasi atau statistik yang valid, akurat, dan ter verifikasi terkait jumlah pelatihan disabilitas

Sumber: Analisis Pribadi, 2024

Berdasarkan gambar 1.1 dan tabel 1.2, Malang menjadi salah satu wilayah dengan jumlah disabilitas yang tertinggi kedua setelah Lamongan di Jawa Timur. Meskipun Lamongan memiliki jumlah penyandang disabilitas tertinggi, berdasarkan Dinas Pendidikan (2024) Lamongan masih memiliki tantangan dalam keterbatasan sumber daya dan dukungan komunitas. Selain itu, kurangnya informasi dan ketersediaan data tentang pelatihan keterampilan di Lamongan juga menjadi kendala dalam pengembangan pelatihan di sana. Sementara itu, menurut Indah Dwi Qurbani dalam Sulistya (2024) Malang menawarkan dukungan

komunitas yang kuat, serta komitmen pemerintah kota untuk menciptakan lingkungan ramah disabilitas. Sehingga, memberikan keuntungan dalam pelaksanaan pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas di Malang.

Kota Malang, pusat metropolitan yang padat penduduknya di Jawa Timur, memiliki beragam fitur sosio-ekonomi dan demografi yang mencerminkan kompleksitas kota-kota di Indonesia. Berdasarkan data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Kota Malang diperkirakan sekitar 900 ribu jiwa, dengan sebaran usia dan posisi sosial yang cukup bervariasi. Kota ini dikenal luas sebagai pusat pendidikan, pariwisata, dan daerah yang dominan untuk usaha ekonomi dan budaya. Namun, ketika menganalisis karakteristik demografis penyandang disabilitas di Malang, banyak aspek yang muncul dan membutuhkan perhatian khusus. Menurut Dinas Sosial dalam Arifin (2024) Kota Malang memiliki 3.224 penyandang disabilitas. Terdiri dari 514 disabilitas mental, 1.474 disabilitas fisik, 661 disabilitas intelektual, dan 575 disabilitas sensorik. Berikut adalah tabel 1.2 yang akan menjelaskan mengenai jumlah penyandang disabilitas pada kecamatan di Kota Malang mulai dari tahun 2019-2021.



Gambar 1.2. Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Kecamatan Di Kota Malang
Sumber: Dinas Sosial Kota Malang, 2023

Data empiris pada gambar 1.2. dari BPS dan Dinas Sosial Kota Malang menunjukkan bahwa tiap tahun jumlah penyandang disabilitas di Kota Malang terus meningkat. Namun, peningkatan ini tidak disertai dengan jumlah fasilitas dan aksesibilitas yang mencukupi dan memadai untuk penyandang disabilitas. Selain itu, pada tabel 1.3 terdapat jumlah penyandang disabilitas menurut usia pada

kecamatan di Kota Malang. Kategori usia yang disebutkan adalah kurang dari 18 tahun, 18 – 35 tahun, dan lebih dari 35 tahun.

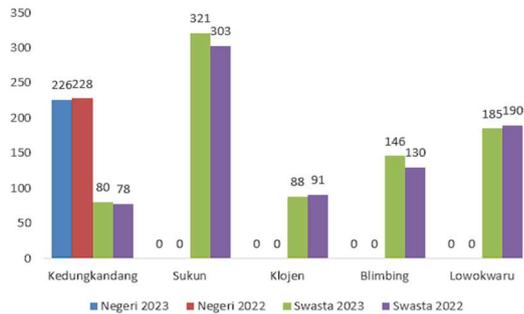
Tabel 1.3. Jumlah Penyandang Disabilitas Berdasarkan Usia di Kecamatan Kota Malang

No.	Nama Kecamatan	Usia		
		< 18	18 – 35	> 35
1.	Kedungkandang	91	74	73
2.	Sukun	55	40	30
3.	Klojen	39	45	35
4.	Blimbing	41	25	34
5.	Lowokwaru	9	15	24
TOTAL		235	199	196
PERSENTASE		37%	32%	31%

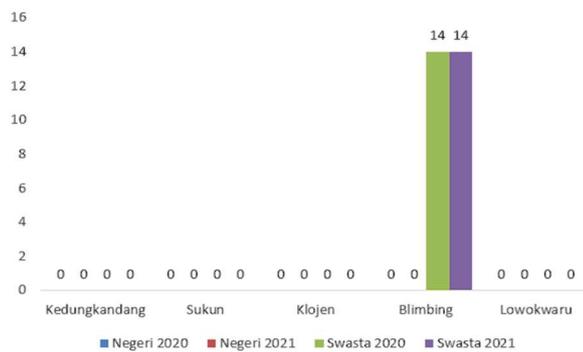
Sumber: Dinata & Prianto, 2023

Berdasarkan Tabel 1.3. Kota Malang memiliki proporsi penyandang disabilitas yang lebih besar pada kelompok usia muda (di bawah 18 tahun), dengan distribusi yang berbeda di setiap kecamatan. Di antara semua kelompok usia, Kecamatan Kedungkandang memiliki konsentrasi penyandang disabilitas terbesar, sedangkan Lowokwaru memiliki konsentrasi yang lebih kecil. Berdasarkan data tersebut, program pelatihan disabilitas harus mempertimbangkan kebutuhan semua kelompok usia secara merata, dari remaja hingga dewasa.

Namun, ada beberapa sekolah di Kota Malang yang menawarkan pendidikan inklusi untuk individu dengan disabilitas. Tempat-tempat ini termasuk sekolah luar biasa (SLB) yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan anak-anak berkebutuhan khusus. Namun, masih sulit untuk menemukan fasilitas yang memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh dan mengasah keterampilan. Diperkirakan sekitar 82% penyandang disabilitas hidup di bawah garis kemiskinan dan sering kali tidak memiliki akses yang memadai terhadap layanan kesehatan, pendidikan, pelatihan, dan kesempatan kerja yang layak. Kota Malang mengalami penurunan ekonomi terbesar bagi para penyandang disabilitas dibandingkan dengan daerah lain (Choirunnisa dan Kusumaningayu, 2024). Tabel 1.4 akan menjabarkan mengenai jumlah murid SMPLB dan SMALB menurut kecamatan dan jenis sekolah di Kota Malang.

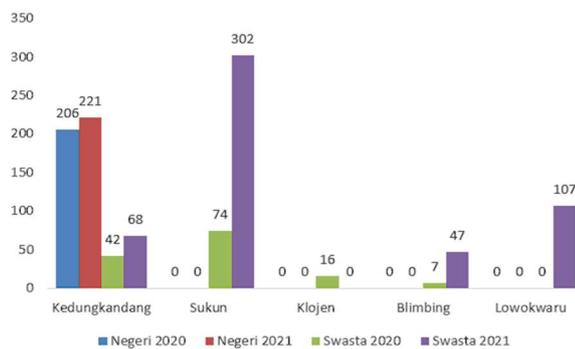


Gambar 1.3. Jumlah Murid SLB Menurut Kecamatan dan Jenis Sekolah di Kota Malang
 Sumber: Dinas Pendidikan Wilayah Malang-Batu Jawa Timur, 2023



Gambar 1.4. Jumlah Murid SMPLB Menurut Kecamatan dan Jenis Sekolah di Kota Malang

Sumber: Dinas Pendidikan Wilayah Malang-Batu Jawa Timur, 2023



Gambar 1.5. Jumlah Murid SMALB Menurut Kecamatan dan Jenis Sekolah di Kota Malang

Sumber: Dinas Pendidikan Wilayah Malang-Batu Jawa Timur, 2023

Dari data pada gambar 1.3 – 1.5 menunjukkan peningkatan terhadap jumlah daya tampung sekolah setiap tahun. Pada SMPLB, daya tampung yang disediakan

sangat terbatas. Namun, SLB menjadi sekolah dengan daya tampung yang banyak, pembagian daya tampung antar kecamatan sangat merata. Selain SLB, adapun pada tabel 1.3 menunjukkan bahwa Lembaga Swasta/ Komunitas juga dapat memberikan akses pelatihan dan pendidikan untuk penyandang disabilitas.

Tabel 1.4. Lembaga Swasta / Komunitas Peduli Disabilitas di Kota Malang

Lembaga/ Organisasi	Pelatihan yang Diberikan	Jumlah Difabel Peserta Pelatihan	Durasi Pelatihan	Fasilitas yang Diberikan
Tasudo Training Center Malang	Pengolahan makanan berbahan dasar kedelai	5	3-5 jam	Hasil praktek Souvenir (kedelai dan sari bahari)
Koperasi Kupu Sutera	Budidaya kupu sutera, pemintalan benang, handycraft, tenun, ecoprint	250, tiap kelas 20 orang	4 hari	Peralatan dan perlengkapan berwirausaha, pendampingan dan kemitraan
Pejuang Mimpi Training Center	Chef academy, beauty class, blogging, writing class, public speaking, digital marketing, brandpreneur, desain, digital printing	10	Sesuai jenis pelatihan	Sertifikat, Bahan pelatihan disesuaikan dengan jenis pelatihan
Pawon Surga Training Center	Pembibitan yogurt, pembuatan kue kering dan basah	2	1 hari	Bibit yogurt, bahan kemasan
Loveusaha	Writing class, public speaking		2-3 hari	Sertifikat, link kerja

Sumber: Dinata & Prianto, 2023

Pada tabel 1.4 terlihat bahwa beberapa lembaga swasta yang menyediakan pelatihan kerja memiliki daya tampung yang sedikit. Sehingga, beberapa penyandang disabilitas di Kota Malang tidak mendapatkan kesempatan dalam pendidikan dan pelatihan. Jadi, dari perbandingan gambar 1.3 - 1.5 dan tabel 1.4 menunjukkan bahwa adanya Sekolah Luar Biasa dan Lembaga Pelatihan Swasta di Kota Malang belum dapat menampung seluruh penyandang Disabilitas di Kota Malang. Oleh karena itu, penyandang disabilitas membutuhkan lebih banyak daya tampung untuk berpartisipasi dalam pendidikan dan dunia kerja. Diketahui hasil dari tabel 1.3 dan 1.4 penyandang disabilitas >18 tahun kurang mendapat pendampingan untuk *skill* kerja. Maka, diperlukan adanya fasilitas yang mendukung pengembangan kreativitas dan kemandirian para penyandang disabilitas yang berfokus pada usia 15 – 35 tahun. Sehingga, dengan adanya fasilitas tersebut diharapkan dapat menampung seluruh penyandang disabilitas di Kota Malang dan sekitarnya dengan merata.

Rancangan fasilitas ini dikembangkan dengan arsitektur multisensori yang mempertimbangkan kebutuhan berbagai macam disabilitas, termasuk disabilitas

fisik dan sensorik (tuna netra, tuna rungu, tuna wicara, dan tuna daksa). Diperlukan fasilitas seperti ruang pelatihan keterampilan yang dilengkapi dengan teknologi adaptif, ruang kreatif yang fleksibel untuk berbagai kegiatan termasuk seni dan kerajinan, dan area sosial yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Selain itu, fasilitas tersebut juga harus mencakup layanan pendukung seperti kemudahan akses transportasi dan fasilitas umum yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Dari rancangan ini, diharapkan semua orang dapat mewujudkan potensi penuh mereka dan memberikan kontribusi positif bagi kehidupan sosial dan ekonomi.

Melalui adanya *Empowerment Hub: Pelatihan Keterampilan Dan Kolaborasi Disabilitas Di Kota Malang*, diharapkan akan tercipta lingkungan yang ramah, di mana para penyandang disabilitas dapat saling berinteraksi, bekerja sama, dan menerima dukungan sosial. Dalam pendekatan multisensori, diharapkan para penyandang disabilitas tidak hanya memperoleh keterampilan yang relevan dengan kemampuan kerja, tetapi juga mengalami peningkatan dalam hal kepercayaan diri dan kapasitas mereka untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan bermasyarakat.

1.2 Tujuan dan Sasaran

Berikut ini adalah tujuan dan sasaran dari rancangan desain *Empowerment Hub: Pelatihan Keterampilan Dan Kolaborasi Disabilitas Di Kota Malang*:

Tujuan:

- Menghasilkan penyandang disabilitas yang siap bekerja secara mandiri di berbagai sektor.
- Menciptakan lingkungan yang ramah disabilitas untuk mendukung kemandirian penyandang disabilitas.
- Menyediakan berbagai aktivitas pelatihan, kreatif, dan sosial yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan setiap disabilitas fisik (tuna daksa) dan disabilitas sensorik (tuna netra, tuna rungu, dan tuna wicara).

Sasaran:

- Menyediakan wadah berupa fasilitas pelatihan keterampilan yang ramah disabilitas.

- Membuat sistem sirkulasi bangunan yang mudah diakses oleh semua orang, termasuk mereka dengan keterbatasan gerak.
- Menyediakan ruang yang mendukung interaksi sosial dan kolaborasi untuk berbagai kegiatan komunitas.

1.3 Batasan Perancangan

Batasan dari *Empowerment Hub*: Pelatihan Keterampilan Dan Kolaborasi Disabilitas Di Kota Malang adalah:

1. Lingkup Pengguna

- a. Menerima semua penyandang disabilitas fisik dan sensorik (tuna netra, tuna rungu, tuna wicara, dan tuna daksa) yang berasal dari Kota Malang dan sekitarnya.
- b. Dapat diakses juga oleh keluarga, pendamping, dan pelatih profesional yang terlibat dalam proses pengembangan keterampilan mereka.
- c. Diperbolehkan bagi masyarakat umum yang ingin berpartisipasi atau mendukung kegiatan pelatihan, terutama dalam kegiatan kolaboratif atau acara komunitas.

2. Lingkup Usia

- a. Melayani pengguna dengan fokus pada remaja dan dewasa penyandang disabilitas dari usia 15 – 37.
- b. Selama pengguna mampu mengikuti dan berpartisipasi dalam kegiatan yang disediakan di *Empowerment Hub*, tidak ada batasan usia.

3. Jenis Kegiatan

- **Pelatihan Berbasis Teknologi:** Mempelajari cara menggunakan perangkat lunak dan aplikasi digital untuk meningkatkan keterampilan di bidang IT, serta memfasilitasi komunikasi dan akses informasi.
- **Pelatihan Keterampilan:** Memberikan kesempatan kepada individu dengan disabilitas untuk memperoleh keterampilan yang sesuai dengan kemampuan dan minat mereka, sehingga mereka dapat meningkatkan peluang kerja dan kemandirian finansial.

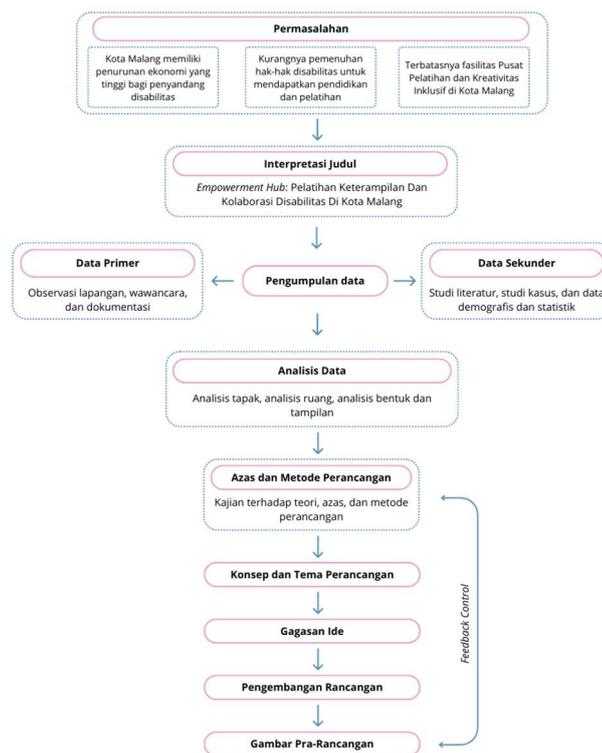
- **Pelatihan Kewirausahaan:** Memberi penyandang disabilitas pelatihan pemberdayaan ekonomi untuk memberikan mereka keterampilan yang diperlukan untuk mendirikan dan mengelola usaha kecil atau proyek kewirausahaan.
4. Dari perbandingan tabel 1.2 dan 1.4 yang menunjukkan data jumlah penyandang disabilitas dan jumlah SLB di Kota Malang, fasilitas ini dapat menampung 200-250 orang.
 5. Seluruh aksesibilitas dan fasilitas akan disesuaikan dengan pengguna disabilitas dengan berbagai jenis (tuna netra, tuna rungu, tuna wicara, dan tuna daksa).

1.4 Tahapan Perancangan

Pendekatan sistematis diperlukan untuk melaksanakan tahapan desain *Empowerment Hub: Pelatihan Keterampilan Dan Kolaborasi Disabilitas Di Kota Malang*, untuk memastikan bahwa hasilnya selaras dengan tujuan desain, kebutuhan pengguna, dan konsep yang diimplementasikan. Diuraikan di bawah ini adalah tahapan-tahapan yang dapat dilakukan:

1. **Interpretasi Judul:** Penggambaran dari Judul “*Empowerment Hub: Pelatihan Keterampilan Dan Kolaborasi Disabilitas Di Kota Malang*” yaitu sebagai pusat pelatihan dan keterampilan yang ramah bagi masyarakat, khususnya penyandang disabilitas.
2. **Pengumpulan Data:** Beberapa metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu studi kasus, data demografis dan statistik, wawancara melalui sumber data primer berupa observasi lapangan dan sumber data sekunder berupa studi literatur.
3. **Analisis Data:** Menganalisis permasalahan, sebab akibat, dan potensi dari data primer dan sekunder yang telah didapatkan. Kemudian, mengolah data tersebut agar menjadi penyelesaian desain dengan pertimbangan data.
4. **Kajian Teori, Azas, dan Metode Perancangan:** Menyesuaikan teori dengan permasalahan dan penerapan prinsip pada inklusivitas dan aksesibilitas multisensori.

5. **Rumusan Konsep dan Tema Perancangan:** Penyusunan gagasan dari data, teori, dan studi literatur untuk membangun dasar yang kuat bagi desain *Empowerment Hub*. Dicapai dengan mengintegrasikan temuan-temuan tersebut ke dalam konsep-konsep desain yang berkaitan dengan proses perancangan.
6. **Gagasan ide:** Mengembangkan ide dengan mempertimbangkan konsep dan tema perancangan yang telah dibuat.
7. **Pengembangan Rancangan:** Mengubah gagasan ide menjadi rancangan pra-rancang dengan penyesuaian.
8. **Gambar Pra-Rancang:** Merealisasikan gambar pra-rancang menjadi sebuah gambar desain berupa *site plan*, *layout plan*, tampak, potongan, dll.



Gambar 1.6. Skema Tahapan Perancangan

Sumber: Analisis Penulis, 2024

1.5 Sistematika Laporan

Sistematika penyusunan laporan tugas akhir yaitu “*Empowerment Hub: Pelatihan Keterampilan Dan Kolaborasi Disabilitas Di Kota Malang*” terdiri dari beberapa bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan:

Bab ini memberikan penjelasan mengenai latar belakang permasalahan, tujuan dan sasaran perancangan *Empowerment Hub: Pelatihan Keterampilan Dan Kolaborasi Disabilitas Di Kota Malang*. Selain itu, bab ini juga memberikan gambaran umum tentang batasan dan asumsi, serta tahapan perancangan dan sistematika laporan yang akan digunakan.

BAB II Tinjauan Objek Perancangan:

Pada bab ini, akan membahas konsep dan teori dasar yang berkaitan dengan konsep perancangan. Konsep-konsep tersebut meliputi prinsip-prinsip desain multisensori dan aksesibilitas yang mendukung. Selain itu, juga akan dibahas mengenai fasilitas-fasilitas yang tersedia di lokasi, serta peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan penyandang disabilitas.

BAB III Tinjauan Lokasi Perancangan:

Bab ini menyajikan analisis tentang lokasi yang dipilih, termasuk kondisi geografis, sosial dan infrastruktur di lokasi tersebut. Bab ini juga akan membahas potensi dan tantangan yang dihadapi terkait dengan lokasi, serta latar belakang lokasi tersebut dipilih.

BAB IV Analisis Perancangan:

Tinjauan mendalam terhadap kebutuhan desain dilakukan dalam bab ini dengan menggunakan temuan dari studi objek dan lokasi. Hal ini termasuk melihat bagaimana organisasi ruang, seberapa mudah diakses, jenis fitur desain multisensori apa yang diperlukan untuk membuat ruang yang ramah bagi semua orang dan membantu orang mempelajari keterampilan baru, dan analisa dari bentuk dan tampilan bangunan yang akan dibuat.

BAB V Konsep Perancangan:

Bab terakhir ini menunjukkan konsep akhir dari *Empowerment Hub: Pelatihan Keterampilan Dan Kolaborasi Disabilitas Di Kota Malang*. Bab ini mencakup garis besar rencana, desain, dan bagian-bagian penting yang digunakan. Bab ini akan membahas tentang bagaimana ide tersebut mewujudkan desain dengan arsitektur multisensori, serta bagaimana mewujudkan ide tersebut ke dalam suatu cara yang dapat memenuhi kebutuhan orang-orang.